



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

Nomor : 2458/HK.04-SD/9206/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Laporan Tahunan JDIH KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Yth. Ketua KPU Provinsi Papua Barat
Di -
Manokwari

Sesuai dengan surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 1523/HK.04-SD/92/2024 Perihal Penyampaian Laporan Tahunan Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Tahun 2024, maka berikut kami sampaikan Laporan Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.

Demikian Surat Pengantar Laporan Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ransiki, 30 Desember 2024
a.n Ketua Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manokwari Selatan
Div. Hukum dan Pengawasan





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

LAPORAN PENGELOLAAN JDIH

TAHUN 2025



www.kab-manokwariselatan.kpu.go.id



-



KPU Kab. Manokwari Selatan



KPU Manokwari Selatan



kpumanokwariselatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
II. PENYELENGGARAAN JDIH.....	2
2.1 ORGANISASI.....	2
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA.....	2
2.3 PRODUK HUKUM.....	3
2.4 TEKNIS PENGELOLAAN.....	10
2.5 SARANA DAN PRASARANA.....	12
III. PENUTUP.....	13
3.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	13
3.2 SARAN.....	13

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Pengelolaan JDIH. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, disebutkan bahwa anggota JDIHN wajib menyampaikan laporan pengelolaan JDIHN setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN. Penyusunan Laporan Pengelolaan JDIH pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 10/HK.04.8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Pengelolaan JDIH ini diharapkan dapat memberikan Informasi yang berguna kepada para pemakai laporan. Selain itu, laporan ini dimaksudkan memberikan informasi kepada masyarakat.

a.n Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan
Hukum dan Pengawasan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum tersebut terangkum dalam JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, disebutkan bahwa anggota JDIHN wajib menyampaikan laporan pengelolaan JDIHN setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN, oleh karena itu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat JDIHN menyusun pedoman pelaporan penyelenggaraan JDIHN sebagai standar pelaporan bagi seluruh Anggota JDIHN.

Pelaporan dilakukan guna memberikan data atau informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan pedoman teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang sarana penyajian dokumentasi produk hukum KPU dan tugas tim Teknis JDIH. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 10/HK.04.8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Tim Teknis JDIH wajib menyampaikan laporan pengelolaan JDIH setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04.8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN JDIIH

2.1 Organisasi

Nama Satker :	Jalan:
KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Jl. Soedjarwo Condronegoro
Kabupaten/Kota :	Provinsi/Kab/Kota
Manokwari Selatan	Papua Barat/Manokwari Selatan
Kode Pos :	Telepon:
98355	-
Faksimili :	Email :
-	-

2.2 Sumber Daya Manusia

Nomenklatur Pengelola JDIIH: Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 410 Tahun 2023			
Diisi dengan bagian pengelola JDIIH:			
Pembina		Tim Teknis	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Rustam D. Rumander	Ketua	Nonlis Elungan	Kasubag Hukum dan SDM
Emanuel Nuba	Anggota	Ferdy Tahya	Operator
Rudi M. Waran	Anggota		
Yosefina Pasolang	Anggota		
Uding	Anggota		
Golda Agatha	Sekretaris		

2.3 Produk Hukum

a. Surat Keputusan

Jenis Dokumen	Fisik / Hardcopy	Web/Softcopy
Tahun 2024		
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 004 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penyaluran Dana Tahapan Pemilu Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Manokwari Selatan	3	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 099 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum untuk Kampanye Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	8	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 154 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Seleksi Tertulis dan Wawancara, Serta Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai Badan Adhoc pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan	11	
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 393 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	24	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 395 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	24	1

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 514 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	13	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 515 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	6	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 593 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	7	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 595 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	5	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 645 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	6	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 645 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Oransbari	6	1

Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024		
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 647 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Momi Waren Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	5	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 648 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Neney Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	5	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 649 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tahota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	5	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 650 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	6	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 651 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan	9	1

Wakil Bupati pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024		
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 654 Tahun 2024 Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	6	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 776 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 se Kabupaten Manokwari Selatan	7	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	7	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1051 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	6	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	6	1

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1083 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	6	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1147 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	3	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1153 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1137 Tahun 2024 Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	5	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1158 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024	4	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1159 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tema, Moderator, dan Pembawa Acara Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024	4	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1161 Tahun 2024 Tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran dan Event Organizer Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024	3	1

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1171 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1062 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	10	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1384 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	5	1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	5	1

b. Standar Operasional Prosedur

Jenis Dokumen	Fisik / Hardcopy	Web/Softcopy
Tahun 2024		
Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Pengelolaan JDIH Nomor 1 Tahun 2024	5	1

c. Berita Acara

Jenis Dokumen	Fisik / Hardcopy	Web/Softcopy
Tahun 2024		
Berita Acara Nomor 875/PL.02.2-BA/9211/2025 Tentang Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	2	1

Jenis Dokumen	Fisik / Hardcopy	Web/Softcopy
Tahun 2024		
Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Peneglolaan JDIIH Nomor 1 Tahun 2024	5	1
Berita Acara Nomor 1090/PL.02.5-BA/9211/2024 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	3	1
Berita Acara Nomor 1183/PL.02.5-BA/9211/2024 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	3	1
Berita Acara Nomor 1185/PL.02.5-BA/9211/2024 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	2	1
Berita Acara Nomor 1446/PL.02.5-BA/9211/2024 Tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024	3	1
Berita Acara Nomor 23/PL.02.7-BA/9211/2025 Tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Terpilih Tahun 2024	2	1

2.4 Teknis Pengelolaan

Pelayanan informasi hukum merupakan salah satu kegiatan utama untuk mendayagunakan koleksi dokumen hukum kepada pengguna informasi. Dokumen hukum berupa produk hukum yang telah ditandatangani oleh Pimpinan selanjutnya akan disimpan dan dibukukan, sedangkan yang berupa softcopy akan diupload dalam web JDIH KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Produk hukum yang dibukukan akan diklasifikasi berdasarkan jenis produk hukum yaitu Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupate/Kota, setiap tahun akan dibuat Laporan Pengelolaan JDIH. Produk hukum yang berupa softcopy diunggah dalam website dengan klasifikasi jenis produk hukum dan tahun penerbitan, sehingga pengguna informasi dapat dengan mudah mencari jenis produk hukum yang diperlukan.

Sudah memiliki struktur Tim Pembina dan Tim Teknis

- Ya, Ada (Surat Keputusan Nomor 410 Tahun 2023 Tentang Penunjukan an Pengangkatan Operator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan)
- Tidak

Sudah memiliki pedoman kerja (SOP)dalam pengelolaan JDIH

- Ya, Ada (Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Opeasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan)
- Tidak

Sudah memiliki abstrak dokumen hukum

- Ya, (Jumlah dokumen hukum yang memiliki abstrak)
- Tidak

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi:

Memiliki halaman Facebook JDIH

- Ya, _____ (Jumlah dokumen hukum yang memiliki abstrak)
- Tidak

Memiliki akun Twitter JDIH

- Ya, _____ (Nama Twitter yang dikelola disertai link URL nya)
- Tidak
- Jumlah/konten yang telah dibuat _____

Memiliki akun Instagram JDIH

- Ya, _____ (Nama Instagram yang dikelola disertai link URL nya)
- Tidak
- Jumlah/konten yang telah dibuat _____

Memiliki channel Youtube JDIH

- Ya, _____ (Nama Youtube yang dikelola disertai link URL nya)
- Tidak
- Jumlah/konten yang telah dibuat _____

Memiliki media lain dalam sosialisasi JDIH

- Ya, _____ (Nama media yang digunakan)
- Tidak
- Jumlah/konten yang telah dibuat _____

2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Sub bagian Hukum dan SDM, antara lain:

No	Barang	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Kerja	1	Baik
2	Meja kursi kerja	3 set	Baik
3	Rak/almari buku	1 unit	Baik
4	Komputer	2 unit	Baik
5	Printer	2 unit	Baik
6	Scanner	1 unit	Baik
7	Internet	1	Baik
8	Pendingin ruangan (AC)	1 unit	Baik

BAB III PENUTUP

3.1 Permasalahan yang dihadapi

Sumber Daya manusia/Staff yang ada di Bagian Hukum tidak memiliki kualifikasi keilmuan di bidang hukum, serta jumlahnya hanya 2 orang staff PPNPN. Untuk pengelolaan JDIH diambil alih oleh Kasubbag Hukum dan SDM, karena 2 (dua) orang staff ppnpn masih baru sehingga masih belum mampu dalam pengelolaan JDIH.

3.2 Saran

Dalam pendistribusian pegawai harus memperhatikan kualifikasi keilmuan serta keseimbangan jumlah pegawai baik ASN maupun PPNPN.

Demikian laporan ini dibuat berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH Tahun Anggaran 2025.

Ransiki, 30 Desember 2024
a.n Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan
Div. Hukum dan Pengawasan



LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR: 410 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Operator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
4. Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesiaa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 048/PP.06/9211/2022 tentang Operator Pengelola Website, Pengelola Konten Website, Operator JDIH dan Operator Media Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Operator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) di lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

KEDUA

: Atas Nama **FERDY SATYA STAF PPNPN** untuk melaksanakan tugasnya sebagai Operator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi, atau diterima dari Pusat Jaringan;
2. Penyampaian salinan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintahan lainnya kepada Pusat Jaringan dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama;
3. Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya dan masyarakat yang memerlukannya;
4. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Instansinya;
5. Evaluasi secara berkala terhadap Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan dan Kepada Pimpinan Instansi.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja dari Operator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA, terhitung mulai Februari s/d Desember 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,**

TTD

GOLDA AGATHA





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

PENGELOLAAN JDIH

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 01 Januari 2024

**2024
RANSIKI**








**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

Alamat : Jalan Soejarwo Condronegoro, Ransiki

NOMOR SOP	1 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	01 Januari 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	01 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	PENGLOLAAN JDIH
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dokumentasi dan informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami aturan yang berlaku2. Memahami pengoperasian komputer3. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU4. Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU5. Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten;Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten;Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Usaha Bagian Umum;Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumentasi dan Informasi Hukum.	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Agenda;2. Komputer/Laptop, Printer dan Scanner;3. Jaringan Internet;4. Stempel Salinan dan Cap Dinas;5. ATK.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kelalaian menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat mengakibatkan tidak temutakhirnya semua informasi produk hukum sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.	<ol style="list-style-type: none">1. Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JDIH

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU					
		Pengampu Konsep (Tim Pelaksana Kegiatan)	Pengelola JDIH	Web Admin	Editor	Penanggungjawab	Pengarah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
1	Membuat Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan.									Softcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan	60 menit	Softcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan	
2	Menyerahkan softcopy konsep tersebut kepada Pengelola Website JDIH.									Softcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan	10 menit	Softcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan	
3	Meneruskan konsep yang telah dibuat dalam bentuk hardcopy untuk diteruskan kepada Web Admin.									Softcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan	10 Menit	Hardcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan	
4	Mengoreksi konsep yang diajukan Pengelola JDIH dan memvalidasi.									Hardcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan	30 Menit	Hardcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Web Admin	
5	Meneruskan hardcopy konsep kepada Editor untuk memperoleh validasi.									Hardcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Web Admin	30 Menit	Hardcopy Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Editor	

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		Pengampu Konsep (Tim Pelaksana Kegiatan)	Pengelola JDIH	Web Admin	Editor	Penanggungjawab	Pengarah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6	Setelah mendapat validasi Web Admin dan Editor, <i>hardcopy</i> usulan pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan kembali ke Pengelola JDIH.							<i>Hardcopy</i> Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Web Admin dan Editor	10 Menit	<i>Hardcopy</i> Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Web Admin dan Editor	
7	Meneruskan <i>hardcopy</i> konsep usulan pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan kepada Penanggungjawab untuk dikoreksi dan divalidasi.							<i>Hardcopy</i> Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Web Admin dan Editor	30 menit	<i>Hardcopy</i> Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Penanggungjawab	
8	Pengarah memvalidasi akhir <i>hardcopy</i> konsep usulan pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan.							<i>Hardcopy</i> Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Web Admin, Editor dan Penanggungjawab	30 menit	<i>Hardcopy</i> Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Pengarah	
9	Setelah mendapat validasi akhir, <i>hardcopy</i> konsep usulan pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan kembali ke Pengelola JDIH.							<i>Hardcopy</i> Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Web Admin, Editor, Penanggungjawab dan Pengarah	10 menit		
10	Mengunggah Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan.							<i>Hardcopy</i> Konsep Usulan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh Web Admin, Editor, Penanggungjawab dan Pengarah	10 menit	Konsep Produk Hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah terunggah di website	

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Manokwari Selatan

SEKRETARIAT
 GOLDA AGATHA
 NIP. 19870219 200912 2 002

PENGESAHAN

- 1 Standar Prosedur Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2 Standar Prosedur Operasional ini dibuat sebagai panduan sub bagian hukum dan sumber daya manusia dalam proses pengelolaan JDIH.
- 3 Standar Prosedur Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun
- 4 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan /revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- 5 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 6 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
- 7 Standar Prosedur Operasional ini berlakuk pada saat di tandatangani.

Disahkan di Ransiki
Pada tanggal 1 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



GOLDA AGATHA

NIP. 19870219 200912 2 002